

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian yang berjudul sekuritisasi isu kebakaran hutan dan asap di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden joko widodo (2014-2016) memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana upaya sekuritisasi isu kebakaran hutan dan polusi asap oleh pemerintah Indonesia pada era Joko Widodo 2014-2016 dilakukan. Rumusan masalah ini berangkat dari sebuah urgensi dimana isu kebakaran hutan dan polusi asap di Indonesia telah menjadi isu yang terjadi setiap tahun selama dua dekade terakhir. Kebakaran hutan dan polusi asap terus menerus terjadi setiap tahun yang menyebabkan banyak kerugian bagi Indonesia sendiri, negara-negara tetangga bahkan masyarakat global. Terdapat suatu bentuk ancaman dari dampak yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas.

Dengan melihat urgensi daripada isu kebakaran hutan dan polusi asap, isu tersebut telah menjadi perhatian regional bagi ASEAN bahkan Global karena dampaknya dapat dirasa langsung bagi negara-negara anggota asean serta berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Tekanan serta dorongan internasional terhadap pemerintah Indonesia semakin tinggi ketika kebakaran hutan tidak menunjukkan penurunan bahkan mengalami peningkatan terutama pada tahun 2013 dan 2015. Hal itu mendorong pemerintah Indonesia untuk mensekuritisasi isu kebakaran hutan dan polusi asap sebagai isu yang mengancam keamanan.

Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan semenjak isu ini diangkat pada forum regional ASEAN di tahun 1997 pada krisis kebakaran hutan masa itu. Pada masa itu arah kebijakan Indonesia

terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama hutan terbilang eksploitatif yang menyebabkan upaya sekuritisasi hanya sebuah retorika belaka tanpa adanya tindakan nyata yang dilakukan untuk menanggulangi isu tersebut. upaya terus pada penerus generasi kepemimpinan pemerintah Indonesia. Namun, kebakaran hutan dan polusi asap tidak mengalami penurunan dan tekanan serta dorongan masyarakat internasional terus meningkat akibat hal tersebut.

Memasuki era pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014, upaya sekuritisasi dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya dan tidak pernah di terapkan oleh pendahulu-pendahulunya. Dengan menyebut tindakan sekuritisasi dengan istilah “*blusukan asap*” Presiden Jokowi membawa keseriusannya dalam menyikapi isu kebakaran hutan dan polusi asap dengan melihat langsung permasalahan yang terjadi dilapangan. “*Blusukan asap*” dilakukan untuk meyakinkan *stakeholder* terkait yang terlibat langsung pada isu kebakaran hutan dan polusi asap baik itu perusahaan-perusahaan, masyarakat lokal yang menyebabkan kebakaran hutan terjadi, hingga pemerintah daerah LSM, hingga lembaga-lembaga non pemerintah lainnya yang bertugas menanggulangi permasalahan kebakaran hutan bahwa isu kebakaran hutan dan asap merupakan isu yang mengancam keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan manusia (*human security*) serta identitas bangsa di mata internasional jika isu ini tidak hadapi dengan serius. Tindakan ini yang menjadi *securitizing move* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai *securitizing actor* dalam tahapan sekuritisasi.

*Securitizing move* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ternyata dapat meyakini para *stakeholder* bahwa isu kebakaran hutan dan polusi asap

merupakan isu yang mengancam. Para *stakeholders* mulai teryakini bahwa isu kebakaran hutan dan asap merupakan isu yang mengancam dan dibuktikan dengan tindakan para *stakeholders* yang memberikan dukungan formal dan dukungan moral. Bentuk dukungan formal dan moral tersebut yang mendorong tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh para *stakeholder* menunjukkan perubahan pada penurunan kebakaran hutan dan polusi asap di Indonesia. Indonesia mendapat apresiasi serta dukungan karena penurunan tersebut dilihat oleh masyarakat Internasional. Bentuk dukungan daripada *stakeholder* inilah yang disebut dengan *acceptance by the audiens* dalam tahapan sekuritisasi.

*Securiting move* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga terkait dalam menanggulangi kebakaran hutan dan asap berjalan dengan baik yang ditandai dengan bentuk dukungan formal dari para *stakeholder* seperti Pemerintah Daerah, BNPB, TNI, masyarakat lokal, korporasi dan lain sebagainya. Dukungan ini menjadi modal awal bagi Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Internasional bahwa Indonesia serius dalam menanggulangi kebakaran hutan dan asap.

Dari kepercayaan masyarakat Internasional, Presiden Joko Widodo kemudian membentuk lembaga *non-structural* khusus bernama Badan Restorasi Gambut (BRG) yang memiliki fungsi untuk menanggulangi isu kebakaran hutan dan asap. BRG terbentuk dan dapat menjalankan fungsi berkat upaya sekuritisasi isu kebakaran hutan dan polusi asap yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dimana dalam struktur kelembagaan dan sumber pendanaannya, BRG bersumber utama pada pendanaan yang didapatkan dari donor, investasi dan dana kerjasama bilateral dari negara-negara lain. sehingga BRG hanya bisa terbentuk ketika

kepercayaan terhadap Indonesia terbentuk serta keyakinan akan kebakaran hutan dan asap di Indonesia dapat diterima oleh masyarakat internasional sebagai isu yang mengancam secara global. Tindakan Presiden Joko Widodo dalam membentuk BRG ini yang dalam tahapan sekuritisasi disebut dengan *extraordinary measure*.

Kasus kebakaran hutan dan asap yang terjadi di Indonesia berhasil disekuritisasi oleh Presiden Joko Widodo dengan melakukan upaya *securitizing move* yang mengangkat isu ini sebagai isu yang mengancam secara global untuk meningkatkan urgensi serta prioritas dalam upaya penanganannya secara domestik, kemudian terdapat *the acceptance by the audiens* dari para *stakeholder* yang teryakini akan isu kebakaran hutan dan polusi asap sebagai isu yang mengancam serta memberikan dukungan formal berupa keseriusan dalam penanganan secara domestik maupun bantuan dana dari luar negeri dan dukungan moral yang berupa bentuk apresiasi dan kepercayaan dari masyarakat domestik maupun internasional. Yang kemudian pada tahapan terakhir dengan membentuk suatu badan khusus yang bertujuan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan asap di Indonesia yang disebut dengan Badan Restorasi Gambut sebagai bentuk *extraordinary measure*.

## **6.2 Saran**

Penelitian penulis dilatarbelakangi oleh sebuah urgensi bahwa kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas telah menjadi isu yang berlarut-larut terjadi di Indonesia yang berdampak secara regional dan internasional. Dari urgensi penelitian ini banyak yang dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang akademisi dalam memahami dan mencari tahu mengenai isu tersebut. Kita dapat menganalisa isu tersebut dari berbagai level analisa yang tersedia dari individu, kelompok kepentingan, negara dan sistem internasional.

Luasnya jangkauan serta kompleksitas isu yang cukup rumit membuat terbukanya kemungkinan dalam merumuskan berbagai rumusan masalah dari isu ini. Untuk itu, saran dari penulis mengenai penelitian lanjutan terhadap isu ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti melihat respon negara-negara tetangga yang terkena dampak, melihat aktor kepentingan dalam isu tersebut, menganalisa efektivitas penanganan, mengidentifikasi sikap negara-negara tertentu terkait isu ini, melihat bentuk kerjasama bilateral dalam isu ini, melihat pola atau motif bantuan luar negeri terkait isu ini, dan lain sebagainya.